

PEMAHAMAN SISWA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KECAKAPAN DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Husnil Kirom¹, Kiki Aryaningrum²
E-mail: kikiaryaningrum86@gmail.com²

¹SMP Negeri 1 Indralaya Utara

²Universitas PGRI Palembang

E-mail: kikiaryaningrum86@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila melalui kecakapan digital pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Metode penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII-C berjumlah 32 orang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Data observasi dianalisis deskriptif kualitatif, angket dianalisis dengan skala likert, tes hasil belajar dengan uji normalitas pretest dan post test, data dokumentasi berupa foto dan video pembelajaran berbasis digital. Hasil observasi ada 25 orang (78,12%) memiliki sikap sosial yang baik, hasil angket 20 orang (62,50%) menjawab sangat sering terkait kecakapan digital, tes hasil belajar ada 22 orang (68,75%) tuntas KKM, dokumentasi menggambarkan aktivitas kecakapan digital siswa memahami nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya peserta didik memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila melalui kecakapan digital mengakses, mengeksplorasi, mengelaborasi, dan menyeleksi berita, informasi, dan materi pembelajaran PPKn masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Indralaya Utara.

Kata Kunci: Kecakapan Digital, Nilai-nilai Pancasila, Pembelajaran PPKn

Abstract

This study aims to determine students' understanding of Pancasila values through digital skills during the Covid-19 pandemic at SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Experimental research method with a quantitative approach. The research subjects were 32 students of class VIII-C. Data collection techniques in the form of observation, questionnaires, tests, and documentation. Observation data were analyzed descriptively qualitatively, questionnaires were analyzed using a Likert scale, learning outcomes were tested with pretest and posttest normality tests, documentation data in the form of photos and digital-based learning videos. The results of the observation were 25 students (78.12%) had good social attitudes, the results of the questionnaire 20 students (62.50%) answered very often related to digital skills, the learning outcomes test was 22 students (68.75%) completed the KKM, the documentation describes the activities of students' digital skills to understand the values of Pancasila. The conclusion is that students have a very good understanding of Pancasila values through digital skills in the form of accessing, exploring, elaborating, and selecting news, information, learning PPKn materials during the Covid-19 pandemic at SMP Negeri 1 Indralaya Utara.

Keywords: Digital Skills, Pancasila Values, PPKn Learning

1. Pendahuluan

Semakin majunya teknologi informasi komunikasi saat ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari warga negara, khususnya pendidik dan peserta didik (siswa). Harapannya agar bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Salah satunya melalui literasi digital sebagai langkah awal terwujudnya warga negara yang siap menghadapi kemajuan zaman. Literasi digital sebagai satu dari sembilan elemen kewarganegaraan digital. Literasi digital tidak hanya memberikan pemahaman

tentang membaca juga etika dan hukum yang mengatur kegiatan bermedia sosial agar terhindar dari tindakan melawan hukum.

Literasi digital sebagai pemahaman individu terhadap respon dalam penggunaan media digital dimana berada. Peserta didik dituntut untuk memahami, menganalisis, dan mencermati hal baru didapat dan tindakan terkait kegiatan digital yang dilakukan. Banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses pemahaman literasi digital ini, seperti cara, sikap, pemahaman, kemampuan mengelola dan memposisikan diri dalam berteknologi dengan baik dan benar.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memfokuskan pada pembentukan warga negara yang baik dan cerdas. Tujuannya agar tercipta warga negara yang memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pembelajaran PPKn adalah proses pembelajaran yang dibekali civic knowledge, civic skill, dan civic disposition dalam mewujudkan smart and good citizenship. Saat ini pembelajaran PPKn lebih ditujukan untuk memperkuat karakter peserta didik di masa pandemi Covid-19 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Harapannya dengan program wajib belajar 12 Tahun dapat menguatkan rasa nasionalisme semua peserta didik.

Penelitian Esty Rahmayanti (2020) tentang Penguatan Literasi Digital untuk Membentuk Karakter Kewarganegaraan Digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan hasilnya pembelajaran PPKn berperan dalam membentuk kewarganegaraan digital sebagai salah satu cara untuk turut mengambil serta bertanggungjawab dalam mempersiapkan warga negara untuk menjadi warga negara yang siap dalam menghadapi tantangan globalisasi. Membentuk warga negara yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam menggunakan internet dengan aman sesuai etika berlaku. Diperlukan literasi digital dalam menerima, mengirim, serta menyebarkan informasi yang kredibel dan valid. Dari penelitian ini memberikan gambaran pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PPKn dengan penguatan literasi digital menggunakan berbagai media pembelajaran. Tujuannya adalah menjadikan peserta didik yang cakap digital sebagai warga negara yang baik dan cerdas dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dilakukan melalui pembelajaran PPKn dengan memanfaatkan berbagai media tersebut dapat menguatkan pendidikan karakter.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah tolak ukur dan acuan bagi peneliti untuk menentukan tindakan atau cara apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan data-data serta informasi dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yakni pendekatan yang menggunakan cara bilangan untuk menggambarkan objek atau variabel, dan penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Eksperimen yakni cara untuk melihat hubungan sebab akibat dari antara dua faktor yang secara sengaja dilakukan oleh peneliti untuk mengurangi, mengeliminasi serta menyisihkan faktor lain yang mengganggu (Arikunto, 2013). Metode eksperimen dilakukan untuk menemukan pengaruh variabel satu dengan variabel lain pada kondisi yang terkendalikan. Pandangan ini juga sependapat dengan Sugiyono (2015) bahwa “eksperimen dilakukan dengan tujuan untuk melihat sebab akibat kibat dari sesuatu yang dilakukan atau diperlakukan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen karena memiliki artian serta tujuan yang sama dari maksud tujuan penelitian peneliti, yakni untuk menguji efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn guna memperkuat pendidikan karakter (kompetensi kewarganegaraan) yang dimiliki peserta didik.

Desain yang digunakan yakni menggunakan desain kelompok kontrol non ekuivalen. Penelitian ini melibatkan dua kelas, yaitu adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas ini, nantinya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok yang menggunakan media Whatsapp dan Google Classroom dalam pembelajaran PPKn, sedangkan kelompok kontrol dalam penelitian ini adalah kelompok yang menggunakan media Whatsapp. Efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik dilakukan dengan pretest dan posttest. Pre-test untuk melihat tingkat homogenitas yang sama diantara kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn untuk memperkuat pendidikan karakter terutama nilai-nilai Pancasila sebagai kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Kemudian post-test untuk melihat bahwa kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan media yang berbeda dengan kelas kontrol pada pembelajaran PPKn berikut ini:

Tabel 1. Desain Penelitian Quasi Eksperimen

Kelas	Pretest	Perlakuan	Posttest
A	O1	X	O2
B	O3		O4

(Sugiyono, 2012)

Keterangan:

O1: *Pretest* (Tes Awal) pada kelompok eksperimenO2: *Posttest* (Tes Akhir) pada kelompok eksperimenO3: *Pretest* (Tes Awal) pada kelompok kontrolO4: *Posttest* (Tes Akhir) pada kelompok kontrol

X : Penerapan efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn

Berdasarkan tabel di atas, maka peneliti melakukan perlakuan (treatment) yang berbeda pada kelas yang akan diteliti. Sampel penelitian pada penelitian ini kelas pertama sebagai kelas kontrol yakni peserta didik mata pelajaran PPKn kelas VIII-A dengan perlakuan menggunakan media Whatsapp untuk melihat efektivitas literasi digital dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik pada pembelajaran PPKn dan kelas kedua sebagai kelas eksperimen yakni kelas VIII-C dengan perlakuan menggunakan media Whatsapp dan Google Classroom melihat efektivitas literasi digital pada pembelajaran PPKn untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Dengan adanya perlakuan yang berbeda ini, maka peneliti bisa melihat dan membandingkan bagaimana keberhasilan serta ketercapaian dari tujuan penelitian, yakni efektivitas literasi dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengkaji perbedaan keberhasilannya.

Penelitian eksperimen digunakan mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dengan kondisi yang terkendali. Sugiyono (2015) mengemukakan eksperimen sering dilakukan dengan tujuan untuk melihat sebab dan akibat dari suatu perlakuan. Metode ini digunakan peneliti karena memiliki tujuan dan kesamaan yakni untuk menguji efektivitas literasi digital pada pembelajaran PPKn untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan dalam penguatan karakter berupa nilai-nilai Pancasila di masa pandemi Covid-19 ini.

Subjek penelitian siswa kelas VIII-A sebagai kelas kontrol dan VIII-C menjadi kelas eksperimen pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Pertimbangan dalam memilih subjek penelitian dilihat dari latar belakang dan prestasi kelas yang dipilih berdasarkan hasil belajar yang didapatkan oleh peneliti selama observasi di lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti memberikan perlakuan berbeda pada masing-masing kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimaksudkan pada pemberian perlakuan kelas kontrol dengan media Whatsapp dan kelas eksperimen media Whatsapp dan Google Classroom pada pembelajaran PPKn untuk melihat efektivitas literasi digital dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Pemberian perlakuan pada kelas eksperimen untuk melihat efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

SMP Negeri 1 Indralaya Utara yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara. Ada beberapa pertimbangan yakni: (a) Sekolah TIK tingkat Provinsi Sumatera Selatan; (b) Tenaga pengajar yang kompeten menguasai teknologi; (c) Sekolah Ramah Anak tingkat Provinsi Sumatera Selatan; (d) peserta didik telah mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama serta dapat diujicoba dengan menggunakan media pembantu dalam aktivitas penunjang pembelajaran termasuk bagaimana literasi digital mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki peserta didik; (e) belum adanya penelitian terkait literasi digital di sekolah tersebut; (f) peserta didik SMP layak mendapatkan pembekalan literasi digital karena diharapkan mengerti cara menggunakan berbagai digitalisasi sebagai media pembelajaran terutama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi Covid-19; (f) lokasi penelitian strategis dan mudah dijangkau untuk melakukan penelitian meskipun di masa pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) saat ini.

Peneliti mengambil populasi yakni peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Pengambilan bagian sampel berdasarkan bagian serta jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2012). Terkait hal ini, Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni teknik sampel tidak random. Kuasi eksperimen, subjek dibagi berdasarkan kelompok tidak dengan cara acak (Ruseffendi, 2005). Hal ini berarti penelitian eksperimen sampel yang diambil peneliti sudah mendapatkan perlakuan yakni perbandingan dan didapatkan sampel dari populasi yang ada berjumlah dua kelompok untuk dijadikan sampel, yakni peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi, angket dengan skala likert, tes hasil belajar, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Kewarganegaraan atau Civic Knowledge mengandung isi tentang hal yang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara. Winarno (2012) menyatakan bahwa pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan pengetahuan kontemporer dan sejarah, yakni struktur dan mekanisme pemerintahan secara konstitusional serta prinsip yang mendasarinya. John Patrick dan Thomas dalam Winarno (2012) membagi komponen pengetahuan kewarganegaraan sebagaimana pada tabel 2 bersumber dari Education Resources Information Center berikut ini.

Tabel 2. Pengetahuan Kewarganegaraan

No.	Uraian Pengetahuan Kewarganegaraan
1.	Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan
2.	Menganalisis dan menjelaskan fenomena
3.	Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu publik
4.	Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan kemasyarakatan
5.	Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan

(ERIC, 2006)

Tabel tersebut menguraikan pentingnya guru PPKn untuk mempelajari model pembelajaran terkait pengetahuan kewarganegaraan secara baik, termasuk cara menentukan dan memodifikasi model dalam pembelajaran agar berkembangnya pengetahuan dan wawasan ilmu kewarganegaraan peserta didik. Desain model dan media pembelajaran PPKn untuk membentuk pengetahuan kewarganegaraan agar peserta didik memiliki pola pikir kritis, kreatif, cerdas, rasional, mampu berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab dan bertindak sesuai aturan, dan menjadi pribadi yang mampu berhubungan harmonis di tengah masyarakat yang heterogen.

Berikutnya adalah Keterampilan Kewarganegaraan atau Civic Skills yakni kemampuan warga negara yakni memiliki keterampilan bertanggungjawab, memiliki pengetahuan, serta efektif disebut dengan kemampuan dalam berpikir kritis. Dimana kemampuan ini memiliki bagian-bagian yakni menganalisis, mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menilai, mengambil serta mempertahankan posisi atas isu. Sisi lain, keterampilan dalam segi partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni aktif mewujudkan masyarakat madani, dimana turut serta dalam menjaga jalannya proses keputusan politik, memecahkan masalah sosial, dan keterampilan mengadakan kerjasama, serta mengatur adanya konflik. Seperti dalam tabel Keterampilan Mengajar berikut.

Tabel 3. Keterampilan Kewarganegaraan

No.	Jenis Keterampilan	Uraian Keterampilan Kewarganegaraan
1	Kecakapan intelektual (<i>intellectual skills</i>)	Mengidentifikasi (<i>identifying</i>) Menggambarkan (<i>describing</i>) Menganalisis (<i>analyzing</i>) Menilai (<i>evaluating</i>) Mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu (<i>taking and defending positions on public issue</i>)
2	Kecakapan partisipatoris (<i>participatory skills</i>)	Berinteraksi (<i>interacting</i>) Memantau (<i>monitoring</i>) Memengaruhi (<i>influencing</i>)

(Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2012)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pembelajaran PPKn selama ini cenderung berfokus pada pemahaman peserta didik pada kompetensi pengetahuan kewarganegaraan, padahal pembelajaran PPKn yang berkonsep keilmuan harus berorientasi pada pengembangan ranah intelektual keterampilan yang sejatinya tidak terpisahkan dari pengetahuan. Dalam taksonomi Bloom pembelajaran menyatakan perlunya menyamaratakan aspek psikomotorik namun tetap juga harus dibedakan. Artinya, hasil belajar dipengaruhi oleh keterampilan seperti keterampilan dalam ranah publik bentuk tanggungjawab kewarganegaraan.

Ketiga adalah Sikap Kewarganegaraan atau Civic Disposition merupakan dasar dari sikap atau watak kewarganegaraan berupa karakter berisyaratkan pada karakter pada karakter publik maupun bersifat privat yang berguna bagi mengembangkan demokrasi konstitusional. Bronson dalam Winarno (2014) menyatakan “pentingnya memiliki watak kewarganegaraan sebagai kebebasan terletak di hati nurani manusia, pria maupun wanita. Apabila sirna maka tak ada hukum, konstitusi, dan pengadilan dapat menyelamatkannya. Bahkan, konstitusi, pengadilan, dan hukum tidak mampu berbuat apapun. Bila ia (nurani) masih berada, maka tidak perlu hakim, pengadilan, dan konstitusi untuk menjaganya”.

Pembelajaran PPKn salah satu Pendidikan karakter maka pendekatan yang digunakan yakni pendekatan berbasis nilai. Karena, dengan sikap seseorang dapat menentukan keberhasilan belajar. Winarno (2014) salah satu yang menentukan keberhasilan belajar peserta didik yakni ranah afektif. Karakter kewarganegaraan pada karakter privat dan publik yakni kecakapan yang dialami oleh seseorang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, serta organisasi. Watak inilah harus dikembangkan dan dipelihara dalam demokrasi dan konstitusi. Uraian tentang Sikap Kewarganegaraan terlihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Sikap Kewarganegaraan

No.	Uraian Sikap Kewarganegaraan
1	Menjadi anggota masyarakat yang independen.
2	Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
3	Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
4	Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
5	Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

(Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2012)

Dari tabel tersebut menggambarkan bawah pengembangan sikap atau watak kewarganegaraan dapat dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk project citizen yakni salah satu bentuk mengembangkan watak kewarganegaraan peserta didik seperti bagaimana memosisikan diri pada kepentingan politik, toleransi politik, nilai-nilai politik serta komitmen dalam pelaksanaan hak

kewarganegaraan yakni demokrasi, dan bertanggungjawab terhadap demokrasi dan konstitusionalisme dan tidak menderung berpartisipasi pada ranah politik (Budimansyah, 2009).

Kompetensi kewarganegaraan adalah kemampuan pengetahuan, nilai-nilai, serta bagaimana sikap dan keterampilan yang menjadi pendukung dalam pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggungjawab dalam bermasyarakat bernegara. Membentuk warga negara yang bijak dan bertanggung jawab terdapat tiga kompetensi yang harus dipenuhi, yakni, pengetahuan, sikap, serta keterampilan. “Ketiga ranah kompetensi ini saling keterkaitan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Jika, warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu membentuk warga negara yang mampu (civic competence), jika warga negara memiliki pengetahuan dan sikap akan menjadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), dan warga negara yang memiliki sikap serta keterampilan akan membentuk warga negara yang komitmen (civic commitment) yang mana tujuan akhirnya membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap serta keterampilan yang menjadikan warga negara yang cerdas dan baik. Jadi, ketiga kompetensi ini harus dimiliki oleh peserta didik sebagai langkah awal untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas dan menjadi pribadi yang memiliki nasionalisme, bertanggungjawab, jujur, kreatif, inovatif, mandiri dan berintegritas” (Winarno, 2014). Selanjutnya digambarkan kegiatan penelitian sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kegiatan Pelaksanaan dan Hasil Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemahaman Nilai-nilai Pancasila melalui Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn (X)	Kegiatan belajar mengajar	Kegiatan Pendahuluan Pembelajaran	Pembukaan pembelajaran
			Apersepsi
			Penyampaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran
		kegiatan Inti pembelajaran	Pembelajaran berpusat pada guru
		Pembelajaran bersifat interaktif	
		Penerapan efektivitas literasi digital dalam pembelajaran PPKn	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami ragam konteks penggunaan media digital - Kognitif, mampu memilih konten atau media digital yang positif dan negatif - Komunikatif - Bertanggungjawab dan kepercayaan diri - Kreatif dalam hal dan cara baru - Kritis dalam menyikapi konten - Bertanggungjawab secara sosial
	Kegiatan penutup pembelajaran	Kesimpulan	
		Refleksi	
Evaluasi			

	Keberhasilan dalam pembelajaran	Tujuan pembelajaran	Hasil belajar peserta didik: 1. <i>Pre-test</i> (tes awal) 2. <i>Post-test</i> (tes akhir)
Kompetensi Kewarganegaraan (Y)	Kognitif	Pengetahuan kewarganegaraan (<i>civic knowledge</i>)	Identifikasi dan menggambarkan kejadian/isu) politik, kewarganegaraan
			Analisis dan menjelaskan fenomena
			Evaluasi, mengambil, dan mempertahankan sisi pada acara dan isu publik
			Pikir kritis tentang kondisi kehidupan bermasyarakat
			Pikir secara konstruktif tentang cara memperbaiki kehidupan kemasyarakatan
	Psikomotorik	Keterampilan kewarganegaraan (Civic skills)	1. Kecakapan intelektual a. Mengidentifikasi b. Menggambarkan c. Analisis d. Mengambil dan mempertahankan posisi atas isu
			2. Kecakapan partisipatoris a. Berinterkasi b. Memantau c. Mempengaruhi
	Afektif	Watak kewarganegaraan (Civic Disposition)	1. Menjadi anggota masyarakat yang independent
			2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
			3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu
			4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
			5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusi secara sehat

Budaya Digital atau Digital Culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, “Budaya Digital sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keIndonesiaan berada pada domain kolektif formal di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dalam ruang negara”.

Indikator Kompetensi Budaya Digital menurut Kominfo, Siberkreasi dan Deloitte dalam Astuti dkk (2021) adalah: “(1) Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara; (2) Digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi; (3) Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya; (4) Hak-hak digital. Indikator pertama dari kecakapan dalam Budaya Digital (Digital Culture) adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki Era Digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keIndonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila”. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berbudaya di Indonesia.

Menurut Nurhajati dkk (2019) jenis kompetensi literasi digital terkait internalisasi nilai-nilai Pancasila salah satunya adalah Paham Nilai-Nilai Pancasila di ruang-ruang digital. “Paham adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan peserta didik untuk mengakses, mengeksplorasi, mengelaborasi, dan menyeleksi informasi terkait Pancasila sehingga pada akhirnya mampu menginterpretasikan konsep nilai-nilai Pancasila dan pengaplikasiannya dalam ruang digital dengan tepat yang dapat dilakukan melalui pembelajaran PPKn”.

Berikut disajikan tabel tentang Nilai-nilai Pancasila dan Aplikasinya di Ruang Digital sebagaimana yang dikemukakan Astuti dkk (2021) di bawah ini.

Tabel 6. Nilai-nilai Pancasila dan Aplikasinya di Ruang Digital

No.	Jenis Kompetensi Literasi Digital	Pemahaman Kompetensi
1	Paham Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital	<p>Paham adalah kecakapan/ kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk mengakses, mengeksplorasi, mengelaborasi, menyeleksi informasi terkait Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga pada akhirnya mampu menginterpretasikan konsep nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan pengaplikasiannya dalam ruang digital dengan tepat.</p> <p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Individu mampu memahami nilai sila pertama Pancasila dan pengaplikasiannya di ruang digital 2) Individu mampu memahami nilai sila kedua Pancasila dan pengaplikasiannya di ruang digital 3) Individu mampu memahami nilai sila ketiga Pancasila dan pengaplikasiannya di ruang digital 4) Individu mampu memahami nilai sila keempat Pancasila dan pengaplikasiannya di ruang digital 5) Individu mampu memahami nilai sila kelima Pancasila dan pengaplikasiannya di ruang digital <p>individu mampu memahami nilai</p>

		Bhinneka Tunggal Ika dan pengaplikasiannya di ruang digital
2	Produksi Konten yang Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital	<p>Produksi adalah adalah kecakapan/ kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Baik proses produksi maupun konten yang dihasilkan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai sila Pertama dari Pancasila 2) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai sila Kedua dari Pancasila 3) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai sila Ketiga dari Pancasila 4) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai sila Keempat dari Pancasila 5) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai sila Kelima dari Pancasila 6) Memproduksi konten yang selaras dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika
3	Distribusi Konten yang Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital	<p>Distribusi adalah kecakapan/ kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menyebarluaskan konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Disini tidak hanya terkait aktivitas berbagi saja namun juga penyertaan sikap yang mengamplifikasi pesan, direpresentasikan dalam simbol/emoticon, komentar, <i>subscribe</i>, <i>follow</i>, mengunggah ulang (<i>repost</i>, <i>regram</i>, <i>retweet</i>, <i>repath</i>) kepada jejaring di media sosial atau media percakapan digital seperti <i>whatsapp</i>, <i>line</i>, <i>telegram</i>, dan aplikasi percakapan lainnya. Distribusi juga berkaitan dengan ajakan untuk bersikap dan bahkan beraksi terhadap isu tertentu.</p> <p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Pertama dari Pancasila

		<p>2) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Kedua dari Pancasila</p> <p>3) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Ketiga dari Pancasila</p> <p>4) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Keempat dari Pancasila</p> <p>5) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Kelima dari Pancasila</p> <p>6) Mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika</p>
4	Partisipasi Aktif Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital	<p>Partisipasi adalah kecakapan/ kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk terlibat aktif dalam aktivitas yang bertujuan menumbuhkembangkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Ruang Digital. Aktif disini berarti menggunakan semua platform digital secara optimal, dengan intensitas tinggi dan jejaring yang luas serta beragam. Aktif juga berarti terus tumbuh, tidak stagnan, namun terus bergerak, membuka diri dalam berjejaring mendukung kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlibat dalam komunitas digital pancasilais lebih dari 1 komunitas 2) Terlibat dalam aktivitas kampanye digital yang pancasilais lebih dari 1 per tahunnya 3) Jumlah komunitas dan aktivitas digital yang pancasilais terus bertambah setiap tahunnya 4) Terlibat dalam komunitas dan aktivitas digital yang beragam entitasnya 5) Intensitas keterlibatan dalam komunitas dan aktivitas digital
5	Kolaborasi Aktif Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital	<p>Kolaborasi adalah kecakapan/ kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menginisiasi, mengelola, memimpin komunitas digital dan aktivitas digital yang pancasilais.</p> <p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginisiasi komunitas digital dan

	<p>atau aktivitas digital yang pancasilais</p> <p>2) Mengelola komunitas digital dan atau aktivitas digital yang pancasilais</p> <p>3) Memimpin komunitas digital dan atau aktivitas digital yang pancasilais</p> <p>4) Jumlah komunitas digital dan atau aktivitas digital yang dikolaborasikan</p> <p>5) Scope komunitas digital dan atau aktivitas digital yang dikolaborasikan</p> <p>6) Keberagaman entitas komunitas digital atau aktivitas digital yang dikolaborasikan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Modifikasi dari Kurnia dkk, 2018; Nurhajati dkk, 2019)

Berdasarkan tabel di atas menjadi capaian dari peserta didik di kelas VIII-C yang diharapkan dari kompetensi ini, yaitu:

1. mampu memahami Sila Pertama, yakni nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas dan menerapkannya di ruang digital.
2. mampu memahami Sila Kedua, yakni nilai-nilai kemanusiaan dan menerapkannya di ruang digital.
3. mampu memahami Sila Ketiga, yakni nilai-nilai persatuan dan menerapkannya di ruang digital.
4. mampu memahami Sila Keempat, yakni nilai-nilai kerakyatan dan menerapkannya di ruang digital.
5. mampu memahami Sila Kelima, yakni nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dan menerapkannya di ruang digital.

Dari kelima konsep kecakapan atau kompetensi yang bisa diinternalisasikan dalam kegiatan literasi digital pada konteks budaya digital terkait nilai-nilai Pancasila selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua pokok, yaitu “pertama, pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara. Kompetensi yang dibutuhkan pada aspek pemahaman siswa adalah Cakap Paham. Kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Kompetensinya adalah Cakap Produksi, Cakap Distribusi, Cakap Partisipasi dan Cakap Kolaborasi”.

Begitupun dengan Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan filosofi bangsa Indonesia”. Hal ini berarti bahwa “setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejatinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga pada kegiatan bermedia digital di Indonesia. Rumusan nilai-nilai Pancasila terkait kemampuan literasi digital sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan atau Religiusitas

“Apa nilai dasar dari sila pertama? Nilai utamanya adalah cinta kasih. Secara sederhana kita diminta untuk hidup beragama dengan baik, memeluk sebuah keyakinan dan kemudian beribadah atasnya. Beribadah di sini tentu bukan hanya bersoal relasi kepada TYME, namun juga bagaimana menjalin relasi dengan sesama. Beragama dan beribadah kemudian menjadi hak setiap warga negara. Kendati demikian, ada dampak logis dari hak. Yakni, kewajiban untuk menghormati agama dan ibadah orang lain. Artinya, kita tidak boleh memaksakan agama, keyakinan dan cara beribadah tertentu kepada orang lain, tidak melakukan perundungan baik verbal maupun nonverbal berdasarkan agama, tidak boleh menghalangi ibadah orang lain dan merusak sarana prasarana ibadah”

“Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dimulai dengan kemampuan untuk mengakses, mengeksplorasi dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel, dan memungkinkan adanya kajian multi perspektif. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dalam filter bubble atau echo chamber, sebuah kondisi yang membentuk penyeragaman pemikiran, adanya ketergantungan pada produsen pesan dan resistensi pada pemikiran berbeda” (Mustikaningtyas, 2018).

2. Kemanusiaan atau Humanis

Apa nilai dasar dari sila kedua? Nilai utamanya adalah setara. Artinya bagaimana kita menjadi manusia dan memanusiakan yang lain dalam berelasi. Konsekuensi logisnya adalah tidak ada yang berlaku seperti “Tuhan”, yang merasa berhak atas hidup orang lain, tidak pula merasa lebih derajatnya dari manusia lainnya atas dasar apapun, dan tidak pula merasa lebih rendah sehingga berhak melakukan apapun tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan. Adil disini mengharuskan kita memperlakukan semua orang sama baiknya apapun latar belakangnya, tanpa diskriminasi. Mengembangkan tenggang rasa, toleransi, empati, tolong menolong dan saling mendukung. Sementara Beradab mengandung nilai penghormatan atas kehidupan sesuai norma agama, sosial, budaya, hukum.

Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kita adalah setara. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik dan perbedaan lainnya dalam hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Kita diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang definisi konten yang berisi penghinaan, perendahan, pengucilan, perundungan terhadap kelompok tertentu. Kita juga diharapkan meluaskan toleransi, misalnya perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan gaya hidup, perbedaan orientasi seksual, perbedaan cara beribadah dan lain sebagainya, dengan membuka akses informasi terhadap isu-isu minoritas di ruang publik.

3. Nilai Persatuan atau Integritas

Apa nilai dasar dari sila ketiga? Inti dari nilai Persatuan Indonesia adalah harmoni. Harmoni artinya mengusahakan, memprioritaskan, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pada pengamalan sila ketiga, kita diingatkan untuk mengutamakan Indonesia di atas kepentingan lainnya, untuk selalu menjalin kerjasama, beraliansi daripada berseteru, mengusahakan konsolidasi daripada memprovokasi konflik. Mempromosikan keberagaman dan meminimalisir prasangka juga stereotip. Hal ini selaras dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, merayakan keberagaman sebagai kekayaan menguatkan bukan melemahkan.

Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai Persatuan Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi dan mengelaborasi pengetahuan tentang Indonesia. Hal ini ditujukan agar pemahaman tentang Indonesia yang kita miliki menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air. Kita juga diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan ujaran kebencian (*hate speech*) yang memprovokasi polarisasi/perpecahan. Disinformasi dan malinformasi adalah jalan yang kerap dipilih sebagai cara memprovokasi. Selain itu, kita harus memahami konsep misinformasi, disinformasi dan malinformasi.

4. Nilai Kerakyatan atau Musyawarah Mufakat

Apa nilai utama dari sila keempat? Nilai yang diutamakan adalah demokratis. Merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, negara menjamin adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bersifat Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), manajemen lembaga publik yang terbuka (transparansi), diakuinya kebebasan berekspresi, peradilan yang tidak memihak, pengakuan hak-hak kelompok minoritas, pemerintahan yang konstitusional, tegaknya supremasi hukum, pers bebas, keberadaan beberapa partai politik (Syafii, 2013). Salah satu implikasi dari prinsip demokrasi adalah egaliter. Semua orang sama di mata hukum. Sebagai warga negara, kita berhak sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi dengan menghormati pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, taat hukum, transparan dan akuntabel.

Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dimulai dengan kesadaran untuk

mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Demokrasi digital juga menjamin adanya prinsip egaliter, sehingga kita harus belajar untuk memberi ruang bagi setiap orang untuk bebas berekspresi. Jika berbeda pandangan, maka bukanlah ruang diskusi yang sehat membangun konsep dan pemahaman bersama.

5. Nilai Keadilan dan Kesejahteraan

“Apakah nilai utama dari sila kelima? Nilai yang diutamakan adalah gotong royong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa kita berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, ekonomi, politik juga kebudayaan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pada pengamalan sila ini, kita diharapkan mampu mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, tidak mengeksploitasi orang lain, tidak bersikap boros dan bermewah-mewahan” (Andrianni dan Rianto, 2019). Menurut Mahardika (2018) bahwa “nilai-nilai lainnya adalah menghargai hasil karya orang lain, dan berkolaborasi mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia”.

“Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimulai dengan kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital, di Indonesia ditetapkan UU ITE yang telah mengalami revisi di tahun 2016, juga UU Kebebasan Memperoleh Informasi. Selain itu di ruang digital kita harus memahami netiquette, sebuah panduan etika berperilaku sebagai warga negara digital. Bergotong-royong di ruang digital berarti kita harus memahami konsep kolaborasi yang dapat mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila harus diatasi dengan memahami konsep dasar nilai-nilai Pancasila sebagai kunci untuk menginternalisasikan nilai-nilai dalam berbagai ruang, termasuk ruang digital”.

“Terdapat sejumlah implikasi yang muncul jika kita tidak cukup memiliki pemahaman atas hal tersebut, yaitu: (1) Tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi mengarah pada segregasi sosial (perpecahan/polarisasi) di ruang digital; (2) Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital; dan (3) Tidak mampu membedakan mis-informasi, dis-informasi dan mal-informasi”.

Selanjutnya adalah pemahaman konsep nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kecakapan digital dalam beraktivitas di ruang digital. Beberapa bentuk kecakapan digital yang dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila, antara lain:

- 1) Produksi Konten berlandaskan Pancasila. Produksi adalah kecakapan yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Baik proses produksi maupun konten yang dihasilkan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi dan kekeluargaan (gotong royong) juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia.
- 2) Distribusi Konten berlandaskan Pancasila. Distribusi adalah kecakapan/kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menyebarkan konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi dan kekeluargaan (gotong royong) juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia. Distribusi tidak hanya terkait aktivitas berbagi, namun sekaligus penyertaan sikap yang mengamplifikasi pesan, direpresentasikan dalam simbol/emoticon, komentar, *subscribe*, *follow*, mengunggah ulang (*repost*, *regram*, *retweet*, *repath*) kepada jejaring di media sosial, atau media percakapan digital seperti *WhatsApp*, *Line*, *Telegram*, dan aplikasi percakapan lainnya. Distribusi juga berkaitan dengan ajakan untuk bersikap dan bahkan beraksi terhadap isu tertentu.
- 3) Partisipasi Aktif dalam Aktivitas Digital berlandaskan Pancasila. Partisipasi adalah kecakapan/kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk terlibat aktif dalam aktivitas yang bertujuan menumbuhkembangkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Aktif disini berarti menggunakan semua platform digital secara optimal, dengan intensitas tinggi dan jejaring yang luas serta beragam. Aktif juga berarti terus tumbuh, tidak stagnan, namun terus bergerak, membuka diri dalam berjejaring mendukung kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Penerapannya bisa dilihat dari keterlibatan dalam komunitas atau kampanye digital yang memperluas jejaring program maupun target sasaran yang

beragam entitasnya secara intens. Dari satu kegiatan, dapat melahirkan kegiatan-kegiatan lain tak kalah penting.

- 4) Kolaborasi Aktif dalam Komunitas Digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi adalah kecakapan/kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menginisiasi, mengelola, memimpin komunitas digital dan aktivitas digital yang Pancasila. Penerapannya dapat dilihat dari jumlah komunitas digital dan atau aktivitas digital yang diinisiasi, dikelola dan dipimpin. Selain itu, penerapan kecakapan kolaborasi bisa dilihat dari cakupan komunitas digital, keberagaman entitas dan aktivitas digital yang diinisiasi.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjadikan peserta didik kelas VIII-C sebagai warga digital yang Pancasila dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) “Peserta didik selalu berpikir kritis. Menjadi warga digital yang Pancasila harus dimulai dengan proses berpikir kritis. Berpikir kritis melatih kita untuk tidak sekedar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar utamanya adalah pertanyaan apakah konten kita benar (objektif, sesuai fakta), penting, dibutuhkan (inspirasi) dan memiliki niatan baik untuk orang lain”.
- 2) “Peserta didik mampu meminimalisir unfollow, unfriend dan Bblock untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Menjadi warga digital yang Pancasila berarti siap untuk berhadapan dengan pengguna internet dengan latar belakang yang beragam. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama atau keberpihakan isu yang sama. Namun demikian, sangat penting kiranya melatih kematangan bermedia. Salah satunya adalah dengan belajar untuk tidak mudah memutuskan pertemanan (unfollow, unfriend, block atau blokir) di media sosial dan media percakapan online. Akibatnya merasa paling benar atas pemikiran sendiri. Hal ini tentu berlawanan nilai-nilai Pancasila”.
- 3) “Peserta didik melakukan gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Menjadi warga digital yang Pancasila berarti memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunitas digital. Pada konteks ini, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesediaan berkolaborasi dengan beragam entitas mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.”

4. Kesimpulan

Pemahaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital di masa pandemi Covid-19 melalui pembelajaran PPKn adalah upaya mengetahui efektivitas literasi digital yang dimiliki peserta didik kelas terutama kelas VIII-A (kelas kontrol) dan kelas VIII-C (kelas eksperimen). Secara kuantitatif terlihat perbedaan dan hasil yang diperoleh. Berdasarkan data observasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, angket dianalisis dengan skala likert, tes hasil belajar dengan uji normalitas pretest dan post-test, data dokumentasi berupa foto dan video pembelajaran berbasis digital. Hasil observasi ada 25 siswa (78,12%) memiliki sikap sosial yang baik, hasil angket 20 siswa (62,50%) menjawab sangat sering terkait kecakapan digital, tes hasil belajar ada 22 siswa (68,75%) tuntas KKM, dokumentasi menggambarkan aktivitas kecakapan digital siswa memahami nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya bahwa siswa memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang sangat baik melalui kecakapan digital berupa mengakses, mengeksplorasi, mengelaborasi, dan menyeleksi berita, informasi, dan materi pembelajaran PPKn di masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Indralaya Utara.

Secara kognitif dilihat dari pengetahuan kewarganegaraan bahwa peserta didik kelas VIII memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan menerapkannya di ruang digital. Secara afektif atau sikap kewarganegaraan, peserta didik mampu menilai konten digital yang selaras atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di ruang-ruang digital. Sementara secara psikomotorik dilihat dari keterampilan kewarganegaraan peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan akademik dan non akademik dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Santi Indra dkk. 2021. *Modul Budaya Bermedia Digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, Japelidi, Siberkreasi).
- Budimansyah, Dasim. 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*. Bandung: Sekolah PPs UPI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII Edisi Revisi*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2018. "Menggali Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia". *AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, November 2018: hal. 267-292.
- Mustikaningtyas, Dhyah. 2018. "Studi Fenomenologi Mengenai Konsumsi Pesan Audiens Instagram Dari Hasil Filter Bubble Media Sosial Instagram". Tesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Nurhajati, dkk. 2019. *Panduan Menjadi Jurnalis Warga yang Bijak Beretika*. Jakarta : Penerbit LP3M LSPR.
- Rahmayanti, Esty. 2020. *Penguatan Literasi Digital untuk Membentuk Karakter Kewarganegaraan Digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*. Vol. 2. 29 Juni 2020. ISSN: 271-467X. Hal. 79-86.
- Ruseffendi, E. T. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Traksaksi Elektronik (ITE).
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Sekolah PPs UPI.